

;/:MENUJU MASYARAKAT TRANSFORMATIF DALAM KEADABAN BARU

Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Rangka Dies FISIP yang KE- 59
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Oleh:

Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP., M.Si.

Bapak/Ibu Perwakilan dari Yayasan Universitas Katolik Parahyangan yang saya hormati,
Bapak Rektor dan Jajarannya yang saya hormati,
Bapak Dekan FISIP dan Jajarannya yang saya hormati,
Bapak/Ibu Ketua Jurusan yang saya hormati,
Bapak/Ibu Ketua Program Studi yang saya hormati,
Bapak/Ibu/Sdr/i, Perwakilan Alumni FISIP yang saya banggakan,
Panitia Dies FISIP Unpar yang ke-59 yang saya hormati,
Para undangan sekalian yang berbahagia,
Rekan-rekan semua seperjuangan untuk kejayaan FISIP Unpar,
Dan tentunya para adik-adik mahasiswa yang selalu ceria dan saya sayangi.

Dalam Nama Tuhan Yesus dan Karya Roh Kudus, Saya Ucapkan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai umat beriman, sudah sepantasnya puji dan syukur yang melimpah kita panjatkan kepada Sang Pencipta atas segala rahmat dan kuasanya mempertemukan kita semua di media online ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat, meskipun kecemasan kita dengan Covid-19 masih belum berkesudahan. Kita pun patut bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa kita masih diberi kekuatan untuk menjadi bangsa dan negara yang utuh, masih bertahan di sisi negara-negara lain, meski kita mengalami begitu banyak masalah kenegaraan, termasuk persoalan yang timbul dari adanya Pandemi Covid-19. Akan tetapi kita yakin bahwa sebagai manusia, kita diberi akal budi dan kekuatan oleh Sang Pencipta untuk membaca berbagai gejala yang timbul di sekitar kita, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, kemudian mengambil hikmah dan belajar untuk melakukan perbaikan dan perubahan di berbagai bidang demi kelangsungan NKRI yang pada tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-75.

Saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan FISIP Unpar beserta jajaran Civitas Akademika FISIP Unpar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan gagasan pada Orasi Ilmiah kali ini, dalam rangka Dies FISIP UNPAR yang ke-59, dengan tema: “*Menuju Masyarakat Transformatif dalam Keadaban Baru*”. Tema yang sangat menantang, kekinian dan penting untuk bersama-sama kita ketahui dan sikapi.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Berbicara mengenai keadaban baru saat ini tidak terlepas dari pemahaman kita tentang konsep perubahan itu sendiri. Sesuatu yang baru, termasuk keadaban baru saat ini adalah hasil dari perubahan. Karenanya, jika kita melihat fenomena keadaban baru yang muncul saat ini, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang janggal, melainkan natur alam dan manusia yang terjadi dalam kehidupan, baik itu yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki, baik yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Perubahan itu selalu saja terjadi dan waktu seakan-akan terasa sangat sedikit. Karena itu, Herakleitos (dalam Kasali,2007) mengatakan bahwa yang abadi hanyalah perubahan. Sehingga secara negasi perubahan menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan berangsur berkurang atau bertambah. Semua dapat menjadi usang atau baru atau sekaligus hilang. Bahkan semua akan mati dalam berbagai konteksnya.

Pada konteks itu maka keadaban baru yang hadir saat ini, idealnya tidak direspon secara *gelagapan* atau panik, jika kita memaknai fitrah dari perubahan itu sendiri. Namun, karena keadaban baru itu terjadi bersamaan dengan Pandemi Covid-19, yang telah mendatangkan bencana kemanusiaan di dunia, maka sebagai individu manusia yang memiliki hati nurani, kekhawatiran yang terjadi di balik peristiwa itu adalah sebuah kewajaran. Karena dampak yang terjadi sungguh besar dan sistematis dalam setiap dimensi kehidupan kita, baik sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, politik, pariwisata, dan sebagainya, sehingga mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Keadaban baru memiliki variasi makna kontekstual. Dalam HUT ke-65 Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Rektor menyampaikan keadaban baru bagi Unpar yang ditandai dengan karakter humanum, kreatif, pluralis, dialogis dan ekologis. Rujukan utama institusi baik di bidang akademik maupun organisasi telah ditetapkan dan dipilih sebagai

pemaknaan keadaban baru. Makna lain dalam konteks penanganan Pandemi Covid-19, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, "keadaban baru" (*new normal*) adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19 sehingga masyarakat selalu produktif, yang sekarang sudah diubah oleh pemerintah menjadi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Jika kita telusuri dari aspek etimologinya, terminologi keadaban baru ini berasal dari 2 (dua) kata, yakni keadaban (kata benda) dan baru (kata sifat). Namun esensinya melekat pada makna dari konsep keadaban itu sendiri (*new civilization*). Untuk konsep keadaban, jika kita menyitir maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin; kebaikan budi pekerti (budi bahasa dsb). Sedangkan konsep baru berarti baru sebagai sebuah kata sifat. Namun, dapat juga bermakna kekinian, baru-baru ini, atau baru berlaku. Mengindahkan telaah etimologi tersebut, maka keadaban baru dapat dimaknai sebagai ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin yang baru-baru ini muncul. Dengan perkataan lain, ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin yang baru berlaku dalam kehidupan kita saat ini.

Pertanyaan mendasar dan penting yang perlu kita cermati selanjutnya adalah Apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan lahir batin? Mengapa kecerdasan lahir batin dengan tingkat yang tinggi muncul dan dituntut dalam peradaban atau kehidupan kita kekinian dan mungkin untuk waktu-waktu ke depan? Dan, bagaimana masyarakat menghadapi, beradaptasi dan melakukan transformasi dengan tuntutan kecerdasan lahir batin pada level yang tinggi tersebut? Hal-hal inilah yang harus kita cermati dan menjadi gagasan penting dalam orasi ilmiah ini.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Tuntutan kecerdasan lahir batin yang tinggi, pastinya tidak begitu saja datang dalam peradaban kita hari ini dan barangkali untuk beberapa waktu ke depan. Pasti ada sebab-sebab atau berbagai fenomena sosial penting dan strategis yang muncul di lingkungan kehidupan kita, sehingga keadaban baru itu lahir.

Beberapa isu sekaligus fakta strategis yang menjadi pengungkit utama, antara lain adalah: ***Pertama, global megatrend.*** Dewasa ini globalisasi dan regionalisasi telah menciptakan perubahan lingkungan sosial-politik-ekonomi-hukum suatu negara-bangsa yang bersifat dinamis, kompleks dan bahkan penuh ketidakpastian. Kecenderungan perubahan ini oleh berbagai lembaga internasional, seperti *Singapore Institute of International Affairs*, KPMG, Price Water House Coopers, dan Ernst & Young tahun 2016 menyebutnya sebagai *Global Megatrends*. Esensi dari fenomena perubahan global yang dihadapi oleh dunia ini oleh Singapore Institute of International Affairs (2017, 4) dijelaskan sebagai berikut: "*phenomena that*

are already unfolding, whose implications are broad, cross-cutting, profound and transformative, and would change the way individuals, businesses and societies live and do business for many years to come...it is important for any community, including the AEC, to learn to adapt to, address and – to the extent possible – capitalise on them.” Artinya bahwa fenomena perubahan lingkungan global pada gilirannya memberikan dampak yang signifikan bagi setiap negara dalam mengupayakan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya. Lebih lanjut, dampak dari Global Megatrends tersebut pada suatu negara, khususnya pemerintah, KPMG suatu lembaga kajian yang berpusat di Swiss menjelaskan sebagai berikut (KPMG, 2016, 2-3): “...*nine global megatrends that are most salient to the future of governments and their core responsibilities of economic prosperity, security, social cohesion and environmental sustainability. While their individual impacts will be far-reaching, the trends are highly interrelated. Therefore, governments will need to consider and evaluate their impacts both in isolation and in combination... possible options for governments to consider using the core tools available – policy, regulation and programs – as well as the strategies, structures and skills that future governments will need to have in place to achieve the characteristics of a ‘leading practice’ government in the future.*” Yang dimaknai bahwa terdapat 9 (sembilan) global megatrends yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdampak pada peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah, terutama pada bidang kesejahteraan ekonomi, keamanan, kohesivitas sosial, dan kesinambungan lingkungan hidup, serta bidang lainnya yang secara kontekstual menjadi kebutuhan suatu negara. Sehingga pada konteks itu, dibutuhkan perubahan pada kebijakan, regulasi, dan program yang menjadi prioritas, selain tentu saja perubahan yang substantif dalam administrasi negara/publik yang menyangkut strategi, struktur dan kompetensi pemerintah. Adapun 9 (sembilan) kecenderungan perubahan global yang terjadi itu, meliputi: (1) perubahan demografis, (2) meningkatnya tuntutan dan kebutuhan individu, (3) perkembangan teknologi yang mengubah tatanan sosial-politik-ekonomi, (4) keterikatan atau ketergantungan ekonomi antar negara, (5) meningkatnya utang negara dan tuntutan bagi pemerintah untuk memastikan tersedianya barang publik, (6) pergeseran kekuatan ekonomi dari kawasan Amerika-Eropa ke kawasan Asia, (7) perubahan iklim, (8) krisis ketersediaan sumber daya alam, dan (9) urbanisasi.

Kedua, revolusi industri 4.0 atau dikenal juga dengan istilah era digitalisasi. Dunia saat ini, khususnya dunia industri benar-benar mengalami perubahan yang sangat mendasar. Cara-cara dan platform baru terbentuk dengan berbasis pada teknologi, yakni dari peradaban industri menuju pada peradaban digital. Itulah era dimana segala yang lama, apakah itu produk, merek, maupun cara bekerja (*bussines proses*) berguguran.

Terjadilah *disruption* dimana-mana. Ketika awal terjadi, seluruh umat manusia terkejut dengan peristiwa tersebut. Karena segalanya serba tidak stabil. Chaos. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan itu mulai kalem. Stabilitas mulai bisa diperoleh. Berbagai peristiwa *shifting* yang terjadi akibat disruption di era revolusi 4.0 ini, tidaklah kecil. Dampaknya sangat signifikan bagi peradaban manusia di dunia, termasuk Indonesia. Yang perlu kita cermati adalah bahwa disruption itu tidak hanya menimbulkan efek shifting, melainkan efek psikologis yang teramat besar bagi dunia industri dan masyarakat pada umumnya di dunia. Digitalisasi yang terjadi dengan keberadaan teknologi yang canggih merubah secara mendasar platform lama menjadi serba online. Pada konteks ini, keadaban baru, pastinya melahirkan dan menuntut berbagai macam perubahan dari masyarakat.

Kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0, mendatangkan 9 macam teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan berbagai usaha dan industri untuk menuju pada era digitalisasi. 9 (sembilan) macam teknologi adalah: (1). *Internet of things*. Ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan dimana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. (2). *Big data*. Sebuah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan banyak dalam bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Dalam konteks pemerintah dan masyarakat pun big data ini sangat berpengaruh dan berguna. (3). *Augmented reality*. Teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. (4). *Cyber Security* adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya *cyberattack*. Cyberattack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. (5). *Artificial Intelligence* merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari *Artificial Intelligence* adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula *Artificial Intelligence* dalam membuat prediksi. (6). *Addictive Manufacturing* merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. (7). *Simulation*. Model mewakili sistem itu sendiri, sedangkan simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti

simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. (8). *System Integration*. merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. (9). *Cloud Computing*. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (login) mengakses *serve virtual* untuk bisa konfigurasi server melalui internet (Schwab, 2017).

Kehadiran revolusi industri 4.0 dengan berbagai teknologi tersebut di atas, tentunya menjadi pekerjaan rumah yang masih harus kita kerjakan pada hari ini dan barangkali untuk waktu-waktu ke depan. Peradaban dunia telah berubah, kita sebagai suatu negara bangsa harusnya pun melakukan berbagai perubahan. Jangan saling menyalahkan atau berdiam diri, sehingga lupa mengerjakan PR dari rumah sendiri. Pasti dampak negatif akan terjadi, jika kita tidak membangun ekosistem yang kondusif dalam peradaban baru tersebut.

Ketiga, Bonus Demografi. Isu strategis ini juga menjadi perhatian saya karena banyak orang beranggapan bahwa bonus demografi ini sebuah gift yang serta merta datang dan akan menjadi modal mendasar untuk melakukan pembangunan negara bangsa, tanpa menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Boleh saja pada tahun 2035, Indonesia mendapat bonus sumber daya manusia berusia produktif yang banyak, namun kualitas harusnya menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk dicari solusinya. Mengapa? Karena berdasarkan Global Human Capital Report tahun 2017 menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia kita berada pada peringkat 65 dari 113 negara. Tingkat kualitas ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti, Singapura (peringkat ke -11), Malaysia (ke-33), Thailand (ke-40), dan Filipina (ke-50). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun ke depan, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan juga tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan *global megatrends* yang terjadi, yang membawa serta peradaban baru dengan teknologi, data dan informasi menjadi elemen penting dalam dunia virtual.

Keempat, adalah Pandemi Covid-19. Masalah aktual yang sedang melanda dunia, termasuk negara kita, tentunya menjadi hal yang sangat memicu terjadinya berbagai perubahan yang mendasar dalam peradaban manusia. Virus Covid-19 yang banyak membunuh umat manusia, yang obat dan vaksinnya belum ditemukan ini, merubah peradaban dalam interaksi manusia. WHO menggagas sebuah konsep baru dengan sebutan *new normal*, yang dalam konteks Indonesia dimaknai sebagai kehidupan

kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru ini, sederhananya adalah bahwa masyarakat Indonesia “berdamai dengan Covid-19” untuk kembali beraktivitas dalam setiap aspek kehidupan, khususnya aktivitas ekonomi, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Protokol kesehatan menurut WHO bahwa jika pemerintahan suatu negara berniat menjalankan kebijakan new normal. Ada enam poin utama yang harus diperhatikan, di antaranya yang terpenting adalah wabah dipastikan sepenuhnya terkendali, tersedia sistem kesehatan secara nasional yang sanggup mendeteksi, mengisolasi, lantas menangani setiap kasus, melacak peta penularan, hingga memastikan masyarakat tetap patuh pada *social distancing*.

Fenomena ini, dalam konteks kekinian telah diterapkan, dan menurut Abdullah (2020), Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM, menegaskan bahwa new normal berimplikasi atau menyangkut dua hal yang harus diperhatikan, yakni: new normal sebagai pernyataan kebudayaan dan new normal sebagai preseden kebudayaan. Pada aspek yang pertama, new normal sebagai pernyataan kebudayaan artinya bahwa adanya Covid-19 menghadirkan sebuah pertanyaan besar tentang seberapa kuat kebudayaan Indonesia elastis dalam memasuki era new normal? Apakah kebudayaan kita punya resilience cukup kuat sehingga bisa mengiringi atau mendampingi masyarakat masuk era new normal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk dijawab.

Pada aspek yang kedua, new normal sebagai preseden kebudayaan, sesungguhnya menjadi sebuah momentum historis karena banyak pihak diajarkan pada sesuatu yang baru dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat dan dituntut untuk beradaptasi serta melakukan perubahan perilaku terhadap berbagai hal yang baru itu. Abdullah (2020) berpandangan bahwa dari normal ke new normal adalah peradaban baru. Semua tidak pada normal yang lama dan secara alami beradaptasi.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Merefleksi dari isu dan fakta strategis sebagaimana disampaikan sebelumnya maka sintesa yang dapat kita ambil saat ini adalah bahwa kita telah masuk dalam sebuah peradaban atau kebudayaan baru, dimana dalam peradaban baru tersebut masyarakat dituntut untuk menjadi masyarakat transformatif, yaitu masyarakat yang memiliki keadaban baru berupa kecerdasan lahir batin dalam memaknai kehidupan atau peradaban baru.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dibawa oleh berbagai isu strategis yang telah disampaikan sebelumnya, yang harus ditekankan juga pada masyarakat adalah bagaimana mengubah krisis dalam masyarakat dari *the losers* menjadi *the winners*. Ekosistem

masyarakat sudah saatnya butuh transformasi sosial budaya untuk menjadikan *the winners*. Karena itu, bagaimana mengkalkulasi energi dan potensi dalam diri masyarakat berupa kecerdasan lahir dan batin, agar menjadi daya juang terhadap tantangan dan peluang yang ada, sudah merupakan suatu keniscayaan.

Kecerdasan pada manusia, secara utuh menurut Zohar & Ian (2002) meliputi kecerdasan fisik, intelegensia, emosional dan spiritual. Kecerdasan fisik adalah bagaimana manusia bisa merawat fisik atau jasmaniah. Efek dari kecerdasan fisik diharapkan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan lancar tanpa mengalami keluhan atau gangguan yang berarti. Kecerdasan fisik yang dimiliki masyarakat akan mampu menjaga dirinya dari penyakit, memelihara kesehatan dan kebugaran dirinya. Kecerdasan intelegensia adalah kecerdasan berpikir manusia untuk memahami dan mengetahui pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari kecerdasan ini adalah pemahaman manusia terhadap segala sesuatu yang bersifat ilmiah, edukatif, dunia pendidikan, dunia nyata yang bisa dilihat dengan mata. Kecerdasan intelegensia bersumber pada kecerdasan otak. Kecerdasan intelegensia ditingkatkan melalui dunia pendidikan. Pendidikan yang diterapkan dengan mengutamakan pemikiran secara logika.

Adapun kecerdasan emosional adalah kecerdasan manusia dalam menyikapi kehidupan yang dihadapi setiap hari. Kecerdasan ini bersumber dari rasa. Perasaan dan emosi yang menandai dalam menyikapi segala sesuatunya. Ada yang mengatakan bahwa kecerdasan emosional berasal dari hati. Sedangkan saya berpikir bahwa kecerdasan emosional adalah sikap yang muncul sebagai perpaduan antara pikiran dan hati. Pengolahan dan pengendalian emosi positif dalam menyikapi kehidupan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalani hidup. Kecerdasan emosi diperlukan dalam hidup manusia terkait dengan hubungan sesama manusia atau hubungan yang bersifat horizontal. Jadi hati memegang peranan penting dalam mengambil sikap. Sedangkan yang dimaksud kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berasal dari hati. Kecerdasan spiritual dimiliki apabila manusia mempunyai tanggung jawab menjaga hubungan manusia dengan Tuhannya. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang timbul akibat adanya hubungan vertikal dalam kaitannya manusia menjaga dirinya terkait dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Tanggung jawab yang muncul dari kecerdasan ini bahwa seluruh raga, jiwa dan hatinya berusaha diselaraskan dengan perintah dan ajaran-ajaran Tuhan. Tidak melanggar aturan dan hukum agama atau pun keyakinan yang dianutnya.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Apabila keadaban baru berupa kecerdasan jiwa dan raga, kita konseptualisasikan dalam perspektif kecerdasan-kecerdasan yang dijelaskan sebelumnya, maka tuntutan perubahan bagi masyarakat, nampaknya terasa berat dan paripurna untuk setiap aspek, bukan sekadar penguasaan teknologi dan sains. Dan, hal ini menjadi keharusan agar proses menuju masyarakat transformatif dapat berjalan dengan baik, demi kebaikan dan kesejahteraan negara bangsa serta kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Kecerdasan jiwa dan raga, juga bisa tinjau dalam konteks kepemilikan kompetensi (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) tertentu oleh seluruh masyarakat pada level yang tinggi. Secara konkrit dalam menghadapi berbagai isu dan fakta strategis yang disampaikan sebelumnya, Scott (2015) menjelaskan bahwa masyarakat pada peradaban atau kebudayaan baru yang hadir hari ini, dituntut untuk memiliki kompetensi pada level yang tinggi dalam hal ketrampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, metakognisi, ketrampilan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, inovasi dan kreasi, serta literasi informasi. Atau dengan gagasan yang serupa, Wagner (2010) dan Change Leadership Group dari Universitas Harvard mengatakan bahwa dalam kondisi perubahan lingkungan strategis saat ini, dibutuhkan berbagai kompetensi yang relevan agar kita dapat *survive*, beradaptasi serta memenangkan kondisi lingkungan yang ada melalui kepemilikan kompetensi, seperti: kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi dan kepemimpinan, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi, inisiatif dan berjiwa entrepreneur, mampu berkomunikasi secara efektif baik secara oral maupun tertulis, mampu mengakses dan menganalisis informasi, serta memiliki rasa ingin tahu dan imajinasi.

Dengan pemikiran yang lain, namun hampir sama, Griffin, McGraw & Care (2012) menegaskan bahwa ada 4 (empat) kategori kompetensi yang dibutuhkan pada era kekinian, yakni *way of thinking*, *way of working*, *tools for working* dan *skill for living in the world*. *Way of thinking* mencakup kreativitas, inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. *Way of working* mencakup keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi dan bekerjasama dalam tim. *Tools for working* mencakup adanya kesadaran sebagai warga negara global maupun lokal, pengembangan hidup dan karier, serta adanya rasa tanggung jawab sebagai pribadi maupun sosial. Sedangkan *skill for living in the world* merupakan ketrampilan yang didasarkan pada literasi informasi, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi baru, serta kemampuan untuk belajar dan bekerja melalui jaringan sosial digital.

Jadi apabila kita berangkat dari rentetan pemahaman terhadap keadaban baru berupa berbagai kecerdasan jiwa dan raga di atas, maka sesungguhnya berbagai isu dan fakta strategis yang melahirkan peradaban baru tersebut tidak selalu mengandalkan kecerdasan kita terhadap

penguasaan teknologi, pengetahuan dan informasi semata, tetapi lebih dari pada itu, yaitu bagaimana kita merefleksikan dan memaknai kehidupan dan/atau peradaban baru yang lahir dalam bentuk cara kita berpikir, cara kita bersikap dan menerapkan nilai-nilai apa yang menjadi pegangan utama kita terhadap peradaban baru yang muncul.

Dengan perkataan lain, apa yang digagas oleh Griffin, McGraw & Care (2012) di atas, yakni: *way of thinking, way of working, tools for working* dan *skill for living in the world* sebagai sesuatu yang penting dan diperlukan masyarakat dalam menghadapi peradaban baru. Proses merefleksi, memaknai, berpikir, bersikap dan berperilaku yang tepat dan benar dengan situasi atau peradaban yang baru, sesungguhnya menjadi hal mendasar menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru.

Mengapa demikian? Karena secara sederhana kita dapat bercermin dari makna perubahan itu sendiri, bahwa perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode dan struktur atau manager-manager baru, namun perubahan pada dasarnya mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku (Kasali, 2007). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Sugiharto (2020), Guru Besar Filsafat Universitas Katolik Parahyangan menegaskan bahwa sejak era pencerahan (Aufklärung) hingga abad ke-21 ini, iptek telah menjadi magisterium paling utama dalam dunia manusia. Sedemikian hingga makna hidup pun kini, disadari atau tidak, sangat ditentukan olehnya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan praktis, mengandalkan iptek tentulah masuk akal, namun hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana secara reflektif kita memaknai kehidupan, cara berpikir, cara bersikap dan nilai-nilai apa yang diprioritaskan, dalam peradaban baru.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan menyepakati bahwa peradaban baru tersebut tidaklah selalu mengandalkan kecerdasan kita terhadap penguasaan teknologi, pengetahuan dan informasi semata, tetapi lebih dari pada itu, yakni bagaimana kita merefleksikan dan memaknai kehidupan dan/atau peradaban baru yang lahir dalam bentuk cara kita berpikir, cara kita bersikap dan menerapkan nilai-nilai apa yang menjadi pegangan utama kita terhadap peradaban baru yang muncul, maka kesempatan ini, saya coba berbagi cerita berdasarkan ingatan saya tentang sebuah video yang berisi cerita menarik dari negeri Thailand, ketika pemerintah mengedukasi masyarakatnya tentang pentingnya ikatan orang tua dan anak. Video edukasi dengan tema "*Technology Will Never Replace All*" (Juni 2014) menunjukkan bahwa betapa keluarga-keluarga muda (milenial) sangat mengandalkan teknologi. Namun, seringkali lupa bahwa anak-anak

mereka membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Kampanye tersebut cukup menyentuh dan viral. Bahkan telah ditonton lebih dari tujuh juta viewers. Video tersebut mengilustrasikan seorang bapak tidak tahu harus berbuat apa ketika mendengar bayinya menangis kencang tanpa henti. Masih dalam kebingungan untuk menenangkan bayi, ia berusaha menelepon istrinya yang sedang keluar rumah berbelanja di supermarket. Istrinya meminta suami untuk memperlihatkan video kartun penguin. Namun, bayi tidak berhenti menangis. Bahkan ketika si ibu melakukan *cilukba* secara online, bayi tetap saja menangis. Tiba-tiba secara intuitif dan perlahan, suami tergerak mengangkat bayinya dari dalam boks. Ia menatap bayi dengan penuh kasih sayang, lalu memeluknya. Bayi pun terlihat terpana dengan tatapan mata si bapak dan tangisan pun seketika menghilang.

Itulah pesan penting yang ingin disampaikan. Bayi adalah manusia yang sama, yang hadir dari masa ke masa. Mereka rindu pelukan dan sentuhan orang-orang yang dikasihinya. Jadi ikatan inilah, yang membantu menenangkan bayi untuk berhenti menangis. Video ini ditutup dengan pesan penting yang telah kita diskusikan di atas, bahwa teknologi tidak selalu akan pernah mampu menggantikan sebuah nilai, yaitu cinta kasih, meskipun menjadi sebuah elemen kunci dari peradaban baru. Dengan begitu, apa yang digagas Prof Bambang Sugiharto ataupun Prof Rhenald Kasali, semakin jelas dan tegas, bahwa kecanggihan peradaban, meskipun telah dipacu oleh teknologi yang canggih, tetaplah tidak identik dengan keluhuran makna keadaban itu sendiri yang menekankan pada kecerdasan jiwa dan raga atau bagaimana secara refleksi kita sebagai individu manusia memaknai kehidupan, cara berpikir, cara bersikap dan nilai-nilai apa yang diprioritaskan.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pemahaman ini sekaligus mengingatkan kita semua, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah pembelajar sejati. Dengan pengalaman, intuisi, imajinasi, perasaan dan logikanya, diyakini mampu untuk berevolusi, beradaptasi dan menguasai peradaban baru yang muncul dalam setiap kesempatan. Hanya soal menunggu waktu yang tepat, sabar, religiusitas dan bijak menghadapinya. Peradaban baru membawa pesan penting bagi umat manusia bahwa kualitas keadaban kita, cara berpiir dan bersikap, haruslah berada pada level yang tinggi, bukan berbasis pada ketakutan, penyintasan brutal, saling menyalahkan dan curiga, kepicikan wawasan, dan "kelompokisme" serakah. Hal-hal tersebut, diyakini pada akhirnya dapat melahirkan kekerasan yang konyol, penyelesaian masalah yang tidak efektif, bahkan mungkin penghancuran diri (Sugiharto, 2020).

Kebutuhan saat ini, guna menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru, perubahan yang dapat dilakukan kepada masyarakat

haruslah dikerjakan secara bersama-sama oleh segenap elemen bangsa, yang dikomandoi oleh pimpinan dengan cara-cara :

Pertama, ciptakan suasana yang mendesak (*sense of urgency*). Perubahan menuju sebuah masyarakat transformatif dalam keadaban baru, harus dimulai dengan kesadaran semua pihak, bahwa peradaban kita saat ini, telah berada dalam situasi yang gawat. Pemimpin yang ditunjuk memimpin perubahan haruslah memulai perubahan dalam masyarakat dengan menunjukkan atau mendiskusikan indikator-indikator kritis, hal-hal yang berpotensi kritis, dan peluang-peluang yang ada di balik fenomena peradaban baru itu. Kalau tidak demikian, maka setiap orang akan tetap berada di zona nyaman dan tidak percaya terhadap apa yang tidak mereka lihat. Maka tugas utama dari pemimpin adalah mengejak semua orang untuk melihat apa yang ia lihat.

Kedua, membentuk kolaborasi perubahan yang kokoh. Perubahan negara bangsa atau perubahan pada masyarakat, biasanya dimulai atau dituntut dari pihak pemerintah. Hal itu, nyatanya tidak akan efektif kalau tidak mendapat dukungan dari berbagai elemen bangsa. Penta helix dengan melibatkan banyak aktor atau elemen bangsa, dipercayai akan lebih mudah dalam menggerakkan perubahan pada masyarakat.

Ketiga, membangun visi bersama. Kolaborasi berbagai aktor dalam perubahan harus bekerja mengerjakan visi bersama ke depan. Tanpa visi yang jelas, maka masyarakat akan kehilangan arah. Visi bukan saja menyangkut sasaran tertentu tetapi lebih dari itu bahwa perubahan yang dilakukan harus menghasilkan output yang jelas.

Keempat, komunikasikan visi bersama. Visi yang baik dalam suatu perubahan harus terkomunikasikan dengan jelas dan terarah. Komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan contoh-contoh. Mengubah cara berpikir, bersikap dan berperilaku masyarakat, umumnya hanya bisa dilakukan dengan contoh konkrit dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Apalagi bangsa kita menganut budaya paternalistik yang kental. Apa yang dilihat masyarakat dengan mata kepala, itulah yang dicontoh dan diteladani.

Kelima, mendorong secara konsisten dan berkesinambungan kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan visi. Pemimpin harus memberikan sumber daya (*resources*), yang memadai agar semua individu masyarakat dapat bertindak untuk mencapai visi. Caranya bukan sekadar memberikan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk mereka, melainkan juga menyingkirkan segala kendala atau rintangan yang ada, agar proses perubahan dalam peradaban baru ini mampu bergerak lincah. Termasuk di dalamnya adalah mendorong semua aktor yang berkolaborasi agar lebih berani untuk melakukan langkah-langkah beresiko dan keluar dengan ide-ide original dan melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif.

Keenam, raihlah kemenangan-kemenangan dalam jangka pendek.

Perubahan pada masyarakat, umumnya tidaklah dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, tidak jarang ditemui perubahan pada masyarakat yang tidak terselesaikan karena jangkauan pandangan yang dituntut terlalu jauh dan bombastis. Jarak yang jauh ini dapat melemahkan semangat setiap orang atau pihak yang terlibat. Maka dari itu, dalam setiap aktivitas perubahan yang dilakukan pada masyarakat, penting bagi pemimpin atau pemerintah memberikan kemenangan-kemenangan antara, agar masyarakat mengetahui di mana mereka berada dan terus bersemangat mencapai visi bersama.

Ketujuh, jangan pernah berhenti, teruslah melakukan konsolidasi. Perubahan ibarat seorang yang mengayuh sepeda. Kalau ia berhenti maka ia akan jatuh. Supaya tidak terjatuh maka ia harus terus mengayuh. Dengan memanfaatkan momentum yang ada, seorang pemimpin dalam kolaborasi yang kokoh, hendaknya terus menerus memperbaharui sistem, struktur, kebijakan-kebijakan, prosedur hingga budaya (nilai-nilai tertentu) sehingga sesuai dengan visi bersama dan tuntutan kebutuhan lingkungannya.

Kedelapan, institusionalisasikan pendekatan-pendekatan baru dan terapkan perubahan secara kultural dari waktu ke waktu. Sebab perubahan pada masyarakat, sebagaimana ditegaskan sebelumnya lebih menekankan pada perubahan budaya, cara berpikir dan bersikap.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dalam perspektif administrasi publik, kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks peradaban baru hari ini adalah bagian dari peran dan fungsi administrasi publik. Argumentasi itu muncul dari basis rasionalitas bahwa administrasi publik sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menentukan kualitas dan kesejahteraan masyarakat bangsa. Pengalaman di berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan, membuktikan bahwa tujuan pembangunan suatu masyarakat bangsa atau pembangunan nasional suatu bangsa membutuhkan prasyarat mendasar, yaitu kapasitas administrasi publik. Pollit (2000) dan Ingraham (2001) menegaskan bahwa administrasi publik yang menekankan nilai-nilai demokratis, efektif, efisien, berkemanusiaan dan berkeadilan, menjadi faktor determinan untuk mewujudkan daya kompetitif suatu bangsa sebagai kekuatan utama dalam pembangunan. Dari titik pandang ini, dapat saya katakan bahwa administrasi publik merupakan *enabling factor* bagi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat bangsa, termasuk dalam konteks menghadapi peradaban dan keadaban baru hari ini. Pemahaman ini mengandung arti bahwa administrasi publik itu bukan soal kelembagaan, tata kelola kelembagaan, produk kebijakan dan pelayanan

publik semata, tetapi lebih dari itu, yakni administrasi publik terbentuk dari konstruksi terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, sebagaimana yang digagas oleh Pollit and Bouckaert (2011).

Sebagai sendi dari tata kelola pemerintahan/negara, administrasi publik merupakan suatu sistem yang dinamis yang dibentuk oleh faktor *exogenous* seperti lingkungan sosial, politik, ekonomi, perkembangan teknologi, budaya, dsbnya, baik yang berada dalam lingkungan domestik maupun regional dan global, dan juga *endogenous* administrasi publik yang meliputi, nilai, sistem, organisasi, proses dan sumber daya manusia. Sifat dinamis tersebut pada intinya menjelaskan bahwa di satu sisi administrasi publik dibentuk oleh lingkungan eksternal melalui proses adaptasi, namun di sisi lain, dinamika internal administrasi publik menentukan pula bagaimana adaptasi dilakukan dalam proses membangun kapasitas administrasi publik. Kemampuan dalam menjawab tantangan *exogenous* dan secara bersamaan *endogenous* ini, akan menentukan kapasitas administrasi publik dalam mengemban visi dan misi pembangunan suatu negara bangsa menuju masyarakat yang transformatif dalam keadaban baru.

Sebagai contoh, dalam konteks peradaban baru yang merubah platform ke era digitalisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah kehidupan masyarakat selama ini. Gelombang kemajuan teknologi baru menciptakan peluang baru, sementara di sisi yang lain menguji kemampuan negara (baca: pemerintah) untuk memanfaatkan dan memberi pengawasan yang bijaksana kepada masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan kritis masyarakat terhadap pemerintah, seperti: Apa yang terjadi terhadap anak-anak kita pada masa mendatang? Bagaimana kita mengembangkan keahlian dan memastikannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman? Bagaimana pemerintah menyediakan sumber daya untuk memastikan anak-anak dapat hidup, tumbuh kembang secara baik di era digitalisasi? Bagaimana pemerintah memastikan tiap-tiap warga negaranya mendapatkan akses informasi dengan baik dan adil? Bagaimana upaya yang akan pemerintah lakukan untuk melindungi hak privasi dan keamanan tiap-tiap warganya di era perkembangan informasi? Tentunya menjadi tantangan, yang harus dicari jalan keluarnya oleh pemerintah.

Demikian juga pada konteks Pandemi Covid-19, pertanyaan-pertanyaan kritis pun bermunculan. Misalnya, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada tiap-tiap warga negaranya? Bagaimana upaya yang akan pemerintah lakukan bagi warganya untuk memperkuat daya saing? Bagaimana upaya yang akan pemerintah lakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pemanfaatan anggaran Covid-19 yang triliunan? Bagaimana upaya yang akan pemerintah lakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan UMK? Apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengentaskan

kemiskinan yang tumbuh di saat Pandemi Covid-19? Bagaimana upaya yang akan pemerintah lakukan dalam mengatur pengembalian biaya pembangunan sekaligus membayar utang negara di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat? dan sebagainya. Adapun terkait dengan isu bonus demografi. Pertanyaan yang muncul adalah Bagaimana kita mempunyai cukup banyak pekerjaan untuk generasi muda? Bagaimana cara kita mengembangkan kompetensi dan memastikannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman? Kesemua pertanyaan itu merupakan tantangan dan secara otomatis menciptakan konstruksi sosial baru dalam administrasi publik untuk mencari solusi terbaik. Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa lingkungan strategis negara dan administrasi publik merupakan hasil dari interaksi resiprokal antara dinamika perubahan eksternal dan internal. Karenanya konstruksi administrasi publik yang dibangun haruslah demikian.

Dalam sudut pandang administrasi publik, Miller & Charles (2007) menegaskan bahwa konstruksi sosial administrasi publik yang diharapkan dewasa ini adalah: (1) merespon dan meningkatkan tuntutan publik terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan; (2) keniscayaan membentuk pemerintahan yang efektif dan responsif; (3) proses pembuatan kebijakan yang partisipatif dan deliberatif; (4) pengarusutamaan kearifan lokal dan *indigenous knowledge*; (5) kemampuan untuk beradaptasi dengan isu-isu global-regional; (6) mengembangkan model *networking* dan *collaboration* dalam relasi pemerintah-bisnis-masyarakat; dan (7) pemanfaatan perkembangan teknologi secara optimal dan tepat tujuan. Kegagalan dalam mengkonstruksi administrasi publik seperti yang diharapkan di atas terhadap berbagai tantangan atau perubahan yang muncul, pada gilirannya akan memperlemah kapasitas kelembagaan pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan publik, penyediaan pelayanan publik serta langkah-langkah strategis yang sesuai dengan tantangan dari perubahan tersebut.

Perubahan administrasi publik untuk menuju masyarakat transformatif dalam peradaban baru, menurut saya, dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal penting, yakni: *pertama*, perubahan peran dan fungsi negara (baca: pemerintah) dalam pemberian layanan publik. Esensinya tugas utama pemerintahan adalah menjamin dan menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, menyediakan layanan publik yang berkualitas, memenuhi ekspektasi publik dan berkontribusi terhadap pembangunan bukanlah pekerjaan yang sederhana, apalagi pada konteks sekarang. Buruknya kualitas layanan, terbatasnya akses publik untuk mendapatkan layanan, birokrasi yang rumit, inefisiensi birokrasi, data yang amburadul, dan keterbatasan sumber daya pemerintah merupakan sekelumit masalah yang menghantui pemerintah.

Contoh pelayanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat Pandemi Covid-19 merupakan fakta empirik yang menggambarkan kondisi tersebut. Karenanya, layanan publik sejatinya merupakan hasil dari kolaborasi atau *co-production*, antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kepada warga negara namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi akuntabilitas bagi seluruh kepentingan publik, tidak hanya untuk pemenuhan kepentingan individu/kelompok tertentu pelanggan atau pengguna layanan. Sebagai contoh, ketika pemerintah menyediakan jaminan sosial tenaga kerja, warga negara atau publik berkepentingan untuk memastikan bahwa pemerintah atau penyedia layanan memfungsikan sistem dan mekanisme jaminan sosial sesuai dengan mandat konstitusi. Sementara itu, di lain pihak pemerintah atau penyedia layanan harus dapat memenuhi standar kualitas layanan yang baik untuk memuaskan kebutuhan dari pelanggan atau pengguna layanan tersebut. Sehingga dari sudut pandang ini, pelayanan publik sejatinya adalah medium bagi perwujudan kepublikan (*publicness*), nilai-nilai kolektif atau kemaslahatan publik (Newman dan Clarke (2009)). Oleh karena itu, untuk memenuhi nilai kepublikan dan kepuasan pelanggan, dituntut tersedianya seperangkat indikator sebagai ukuran untuk menilai terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut. Indikator-indikator yang dimaksud jika meminjam pemikiran Carlson dan Schwartz (1995) dalam Denhardt & Denhardt (2007), meliputi: "(1) *convenience*; (2) *security*; (3) *reliability*; (4) *personal attention and problem-solving approach*; (5) *fairness*; (6) *fiscal responsibility*; (7) *citizen influence*". Prinsip-prinsip ini dianggap menampilkan cita rasa nilai kewarganegaraan dan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, indikator *reliability* menegaskan tentang bagaimana pelayanan dapat disediakan secara tepat, baik dari sisi metode dan waktu, kepada pengguna layanan yang memanfaatkan layanan. Sementara indikator *citizen influence* memberikan penekanan pada bagaimana warga negara sebagai pemilik pemerintahan mempunyai hak dan kekuasaan untuk mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah/penyedia layanan.

Kedua, proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Pada konteks ini, ditegaskan bahwa urusan dan masalah publik hari ini, tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan oleh sebuah interaksi di antara pemerintah dan berbagai aktor non pemerintahan, bisnis dan masyarakat (*governance*). Bahkan pada skala yang lebih luas, urusan dan masalah publik sudah lintas dunia. Perkembangan masalah publik saat ini, telah menunjukkan isyarat yang jelas bahwa perlahan tapi pasti, ego semakin memberi tempat kepada segala pihak lain untuk bersama-sama menyelesaikan suatu masalah publik tertentu. Solidaritas dan kebersamaan menjadi nilai penting yang berkembang dalam mencari solusi terhadap suatu masalah publik yang muncul dalam suatu kebijakan tertentu. Kasus

Covid -19 ini sangat merefleksikan hal tersebut.

Ketiga, operasionalisasi tata kelola pemerintahan, dengan sumber daya manusia yang unggul. Pada konteks ini, harapannya diperlukan SDM unggul dan memiliki kecerdasan lahir batin yang tinggi. Meritokrasi menjadi sebuah konsep penting yang dibutuhkan oleh manajemen SDM agar operasionalisasi pemerintahan dikelola secara baik dan bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai kepublikan atau kewarganegaraan, bukan berorientasi pada kekuasaan atau pun kepentingan individu, kelompok atau golongan. Meminjam pemikiran Cornelis Lay (2020) Guru Besar FISIPOL UGM, idealitasnya, SDM dalam pemerintahan termasuk para pejabatnya harus memiliki intelektualitas atau kecerdasan /berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga kekuasaan yang dimiliki sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tidak dijadikannya untuk menekan atau menyengsarakan rakyat, melainkan harus mengutamakan kepentingan rakyat. SDM dalam pemerintahan pun harus menempatkan nilai kemanusiaan sebagai motif utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tak kalah penting dengan aspek di atas bahwa tuntutan terhadap SDM haruslah menjadi insan inovator atau agen pembaharu. SDM harus berani membuat terobosan. Tidak rutin dan monoton, melainkan selalu melakukan pembaharuan dan inovasi

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Berlandaskan dari elaborasi yang relatif panjang di atas, setidaknya ada beberapa nilai penting yang perlu kita refleksikan dan sikapi dalam tindakan kita sebagai masyarakat kampus FISIP Unpar, dalam kiprah pengabdianya pada masyarakat dan sumbangsih pemikiran kepada negara. Nilai-nilai esensial yang lahir dari peradaban baru ini, terpotret meliputi: nilai kebersamaan, solidaritas, peduli, kewarganegaraan, intelektualitas, kemanusiaan dan keadilan. Nilai-nilai universal yang sejalan dengan nilai-nilai Sindu yang kita miliki. FISIP Unpar, janganlah hanya menjadi “institusi menara gading” yang megah, yang tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, tetapi mampu menjadi pusat pembelajaran yang terbaik untuk dibaktikan kepada masyarakat.

Untuk itu, saya mengajak kita semua dalam nilai-nilai itu, bersama pemerintah dan masyarakat melakukan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat dengan intelektualitas atau kecerdasan kita. Kita memulainya dengan perubahan cara pandang kita (*change our mindset*). Kita memang tidak akan melakukan perubahan secara benar dan baik, apabila kita masih bertahan dengan cara-cara lama dalam peradaban baru hari ini. Kata orang bijak, “*change our mindset change our future*.” Kita semua pun harus memiliki wawasan inovasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi yang hebat adalah organisasi yang berinovasi.

Kita semua insan FISIP Unpar, tidak bisa lagi terlena dan berleha-leha untuk menemukan cara baru menanggapi tantangan peradaban baru yang ada. Kita perlu sebuah nilai intelektualitas atau kecerdasan untuk berpikir beda sekaligus sebuah obsesi yang tidak kecil untuk mewujudkan apa yang ingin lakukan bagi masyarakat dan negara. Kita harus punya tim, yang “membawa tidur” permasalahan dan “membangunkan buah pikiran” yang tidak sekali jadi. Karena jatuh bangun adalah bagian dari inovasi dan itu harus kita semua sadari. Saat ini, semua kita, harus memiliki *mindset* bahwa kesalahan harus dilihat sebagai suatu proses pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegagalan adalah hal biasa sejauh kita belajar dari kesalahan dan dengan cepat memperbaikinya. Kesadaran ini dapat membebaskan kita dari ketakutan mengambil resiko didalam peradaban baru yang bergerak begitu cepat, kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Karena ketika kita memutuskan untuk berhenti mengambil resiko dalam proses perubahan ini, maka pada saat itulah kita akan mulai tertinggal dan ditinggal oleh perubahan itu sendiri.

Selain itu, nilai penting yang perlu kita refleksikan dan sikapi adalah saling respek dalam kebersamaan. Kita sadari bahwa perubahan selalu melahirkan resistensi di dalamnya, maka sangat dibutuhkan *value* berupa sikap respek dalam kebersamaan. Ketiadaan nilai ini, dapat berkembang menjadi keengganan untuk menciptakan kekompakan atau kebersamaan sebagai syarat membangun tata kelola yang baik. Apalagi kita dihadapkan pada kondisi masyarakat yang majemuk. Sikap respek ibarat jantung hubungan interpersonal. Artinya bahwa tanpa sikap respek maka hubungan interpersonal di dalam organisasi kita sendiri atau dalam relasi kita dengan masyarakat dan pemerintah akan mati, dan berimplikasi pada “matinya” kebersamaan itu. Mulai hari ini, kita semua harus merubah *mindset* kita, guna menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru dengan memandang setiap kita sebagai “*people of value*”. Insan manusia yang berharga dengan keberagaman potensi dan perannya sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan kepandaiannya.

Bapak/Ibu/Romo/Sdr/Sdri dan Para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Demikianlah buah pikiran yang dapat disampaikan, dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, serta ucapan terima kasih yang mendalam atas perhatian Bapak/Ibu/Romo/Sdra/Sdri semua untuk sekadar mendengarkan gagasan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menunjukkan jalan dan merestui segala tindakan kita dalam melakukan hal-hal baik menuju masyarakat transformatif dalam keadaban baru. Perubahan memerlukan Anda semua. Bersatu, bergerak

dan menyelesaikannya. Selamat Ulang Tahun FISIP Universitas Katolik Parahyangan ke-59. Tetaplah teguh dan semangat untuk menjadi pusat pembelajaran yang terbaik berdasarkan sesanti *Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti*, berdasarkan Ketuhanan menuntut Ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Tuhan memberkati.

Bandung, Agustus 2020

Maria Rosarie Harni Triastuti

Daftar Sumber Bacaan

- Abdullah, Irfan. 2020. Menyiapkan Kenormalan Baru. UGM Talks. 29 Mei 2020.
- Denhardt, Janet V, Robert B. Denhardt. 2007. *New Public Service: Serving, Not Steering*. New York. M. E. Sharpe.
- Griffin, P., McGaw, B. and Care, E. (eds). 2012. *Assessment and Teaching of 21st Century Skills*. Dordrecht, NL, Springer
- Kasali, Rhenald, 2007. *Re-Code Your Change DNA: Membebaskan Belunggu-Belunggu untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan dalam Pembaharuan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- , 2018. *The Great Shifting*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miller, Hugh T & Charles J. Fox. (2007). *Postmodern Public Administration*. (2nd Edition). New York. M. E. Sharpe. Inc.
- Newman, Janet and John Clarke. (2009). *Publics, Politics and Power: Remaking the Public in Public Services*. London. Sage Publication.
- Schwab, Klaus. 2017. *The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Response*.
- Scott., C., 2015. *The Future of Learning 2: What Kind of Learning for 21st Century*. Education Research and Foresight. UNESCO Working Paper.
- Sugiharto, Bambang. *Keadaban Baru*. Opini dalam Kompas. 7 Agustus 2020
- Pollitt, Christopher, Geert Bouckaert. (2011). *Public Management: Comparative Analysis-New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State*. Oxford. Oxford University Press.
- Zohar, D & Ian Marshall. 2002. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- KPMG International. 2016. *Future State: The Global Megatrends Shaping Government*. Toronto. KPMG International.